BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

**2.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Tujuan dasar dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selain itu, menekankan bahwa informasi yang disajikan dapat berguna jika laporan keuangan menunjukkan realitas ekonomi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna menurut (Shahwan, 2008). Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyaratan normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami (PP Nomor 71 Tahun 2010).

1. Relevan,

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

1. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

1. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

1. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memperngaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal,

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

1. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

1. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan,

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

**2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini memberikan informasi bahwa laporan keuangan Pemerintah akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga dapat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam (Indriasari dan Nahartyo, 2008) berpendapat bahwa :

“untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas”.

Menurut Bastian (2006), menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualiatas memerlukan :

“Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai Akuntansi Pemerintahan. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Betapapun bagusnya Standar Akuntansi Pemerintahan, tanpa didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit untuk dicapai”.

Sedangkan menurut Arens (2014:340) menyebutkan bahwa tujuan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) adalah :

“Tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) yang meliputi antara lain menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan pengendalian internal tersebut maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut yang dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah dengan beberapa faktor seperti sumber daya manusia yang berkulitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas lalu. Sistem Pengendalian Internal yang meliputi antara lain menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan pengendalian internal tersebut maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas dan didukung oleh Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

**2.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Menurut Nordiawan dan Hertianti, (2010) Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku. SAP merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP pada pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan yang berkualitas, Transparan dan Akuntabel. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang berkaitan dalam materi yaitu sebagai berikut:

1. PSAP No. 01 (Penyajian Laporan Keuangan)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1. PSAP No. 02 (Laporan Realisasi Anggaran)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1. PSAP No. 03 (Laporan Arus Kas)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1. PSAP No. 04 (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL) Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1. PSAP No. 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian)

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

1. PSAP No. 12 (Laporan Operasioanl)

Laporan Operasional memnyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari entitas pelaporan yang penyajianya disandingkan dengan priode sebelumnya.

**2.4 Kualitas Aparatur Pemerintah**

Kualitas Aparatur Pemerintah Dalam suatu organisasi terutama oragnisasi pemerintahan terkait upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisasi. Sukmaningrum (2012), menyatakan bahwa kompetensi adalah “pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas”. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnnya. Kompetensi aparatur (SDM) yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber daya manusia menjadi penentu berjalan tidaknya suatu, selain ketersediaan sarana maupun prasarananya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya menajamen sumber daya manusia (MSDM) yang dilihat dari (a) Pengetahuan, (b) Keahlian, (c) Perilaku. Pemerintah daerah sangat membutuhkan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif.

PNSD yang professional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas, dapat melihat dari. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. Berikut ini indikator pegawai yang baik dalam kualitas aparatur pemerintah adalah :

1. Uraian tugas pokok sesuai dengan fungsi

2. Pengetahuan tentang siklus akuntansi

3. Pengetahuan tentang peraturan yang telah ditetapkan

4. Kemampuan dalam menyusun laporan keuangan

5. Pendidikan dan pelatihan

6. Mengedepankan etika dalam bekerja

**2.5 Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaranya menurut Arens (2014). Komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang SPIP, menjelaskan tentang beberapa poin penting antara lain :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

3. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :

a. Lingkungan pengendalian;

b. Penilaian risiko;

c. Kegiatan pengendalian;

d. Informasi dan komunikasi;

e. Pemantauan pengendalian intern.

5. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b. Pembinaan sumber daya manusia;

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui, (a) penegakan integritas dan nilai etika, (b) komitmen terhadap kompetensi, (c) kepemimpinan yang kondusif, (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern pemerintah dapat dilihat pada tabel 2.1 :

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Variabel Dependen/Independen** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Irwan, (2011) | Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi sumatera barat.  | Y: kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi sumatera barat.X1: penerapan sistem pengendalian intern pemerintahX2: kompetensi sumber daya manusiaX3: penerapan standar akuntansi pemerintah | 1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 2. Terdapat pengaruh signifikan dan positif Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 3. Terdapat pengaruh signifikan dan positif Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. |
| 2 | Oktarina, Raharjo, Andini, (2014) | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang  | Y: Kualitas Laporan KeuanganX1: Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanX2: Kualitas Aparatur Pemerintah DaerahX3: Penerapan *Good Governance* | 1. penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kaulitas laporan keuangan2. Kualitas apatatur pemerintah berpengaruh signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan.3. *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan4. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, variabel kualitas aparatur pemerintahan dan good governance secara bersama–sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan |
| 3 | Ningtyas dan Widyawati, (2015) | Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah | Y: kualitas laporan keuangan pemerintah daerahX1: efektivitasX2: standar akuntansi pemerintahan | Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. |
| 4 | Santoso (2016) | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung | Y: Kualitas LKPDX1: Penerapan SAPX2: Penerapan SPIPX3: Kompetensi SDMX4: Pemanfaatan Teknologi informasi | 1.Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD2. Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.3. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD4.Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung |
| 5 | Triwardana (2017) | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD | Y: Kualitas Laporan Keuangan SKPDX1: Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanX2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia | 1. penerapan standar akuntansi pemerintahberpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.2.penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.3. kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah |

*Sumber:* *Dari data yang di olah, 2018*

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

 **H1**

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2)

Kualitas Laporan Keuangan

(Y)

 **H2**

Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (X3)

 **H3**

 **H4**

*Sumber:* *Dari data yang di olah, 2018*

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan : = uji t

 = uji F

Berdasarkan gambar, maka peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan, Sistem Pengendalian Inter Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (variabel independen) Kota Palembang.

**2.8 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya secara statistik. Penelitian ini ingin membuktikan penerapan SAP (X1), kualitas aparatur (X2), dan SPIP (X3) yang diduga berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di kota palembang. Perumusan hipotesis penelitian berdasarkan urutan-urutan variabel adalah sebagai berikut:

**2.8.1 Hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut PP 71 tahun 2010 standar akutansi pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Mahmudi (2011:27) mengemukakan bahwa standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan kosistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan SAP digunakan sebegai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Irwan, 2011). Penerapan SAP oleh pemerintah daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna (Zeyn, 2011). Efektivitas penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ningtyas dan Widyawati, 2015). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara Penerapan SAP terhadap kualitas LKPD sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**2.8.2 Hubungan antara Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas aparatur pemerintah (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena yang menjalankan SAP dan SPIP adalah sumber daya manusia. Sebaik apapun sistem dan peraturan yang dibuat tetapi jika kompetensi SDM yang menjalankan kurang memadai maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan (Irwan 2011). Kapasitas sumber daya manusia, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Indriasari Dan Nahartyo, 2008). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD maka penulis mengajukan hipotesis:

H2 : Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**2.8.3 Hubungan antara Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Ditetapkannya sistem pengendalian intern pemerintah dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansin akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, tepat waktu, akurat, dan lengkap serta dapat diaudit. Jadi, dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik haruslah sesuai dengan PSAP dan SPIP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya suatu sistem pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kenyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Rai, 2008:283). Pengendalian intern akuntansi memiliki korelasi positif dan memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan (Darwanis dan Mahyani, 2009). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara SPIP terhadap kualitas LKPD maka penulis mengajukan hipotesis:

H3 : Sistem Pengendalian Inter Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**2.8.4 Hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kualitas Aparatur Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Nordiawan (2010:25) mengemukakan penerapan standar akuntansi pemerintah diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, andal, relevan, dapat dipahami, tepat waktu, akurat dan lengkap serta dapat diaudit harus sesuai dengan PSAP dan SOP yang ditetapkan pemerintah. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya suatu sistem pengendalian intern. Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa “untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus di lalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah dimana sistem akuntansi itu sendiri didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern. Kemudian yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah sangat membutuhkan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif.

Berdasarkan beberapa teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Kusuma (2012:9) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indriasih (2014) yang menunjukan bahwa kualitas aparatur pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widari (2017:127) tentang sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**2.9 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan menurut Sugiyono (2013:93). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H2 : Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H4 : Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.